



SEBAGIAN DANA SUDAH MASUK APBD

## Pencairan Tergantung Kesiapan Kelurahan

**UMBULHARJO (MERA-  
PD)** - Dana kelurahan dari pemerintah pusat saat ini sudah masuk ke kas daerah APBD Kota Yogyakarta. Pencairan dana tersebut ke kelurahan nantinya tergantung dari kesiapan masing-masing kelurahan dalam mengajukan surat permintaan pembayaran.

"Sudah masuk dana kelurahan ke APBD. Nilainya 50 persen dari total alokasi dana kelurahan yang diterima Kota Yogya," kata Kepala Bidang Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tugiyarta, Minggu (21/4).

Total alokasi dana kelurahan di Kota Yogyakarta sekitar Rp 325 juta/kelurahan. Dengan ada 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, sehingga total dana kelurahan mencapai sekitar Rp 15,84 miliar. Oleh sebab itu 50 persen dari alokasi total dana kelurahan yang masuk ke kas APBD Kota Yogya sekitar Rp 7,31 miliar.

Menurutnya peraturan walikota terkait penjabaran penggunaan anggaran sudah dilakukan oleh beberapa kecamatan pada bidang anggaran di BPKAD. Dia menyatakan setelah dana kelurahan di kas daerah, pencairan ke keca-

matan tergantung dari kesiapan kelurahan masing-masing. Mengingat kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan sebagai kuasa pengguna anggaran.

"Pencairan tergantung kesiapan di masing-masing kelurahan. Mekanismenya kelurahan mengajukan surat permintaan pembayaran terhadap program yang sudah dilaksanakan. Surat permintaan pembayaran ke pemkot lewat bendahara umum daerah," terangnya.

Pihaknya menyatakan sudah melakukan pembinaan kepada semua kelurahan. Perangkat-perangkat pendukung dalam mengelola dana kelurahan itu, di tingkat kelurahan juga sudah dibentuk seperti bendahara pengeluaran pembantu, pejabat pelaksana kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan pembantu. Jika kekurangan sumber daya di kelurahan, personel di kecamatan diperbantukan.

"Perangkat-perangkat itu harus ada agar kelurahan bisa mengelola secara man-

diri dana kelurahan. Dalam dana kelurahan ini camat sebagai penguasa anggaran dan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran," papar Tugiyarta.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, setelah dana kelurahan masuk ke kas daerah tidak bisa langsung pencairan dana ke semua kelurahan.

Harus ada perencanaan penggunaan dana kelurahan dari masing-masing kelurahan. Rencana penggunaan dana kelurahan itu harus dilampirkan dalam perwal terkait penjabaran anggaran sebagai dasar untuk pencairan dana dari APBD.

"Teman-teman dari beberapa kelurahan masih ada yang membahas perencanaannya. Tidak bisa kelurahan satu selesai perencanaan lalu dicairkan tapi kelurahan lain belum. Itu karena semuanya satu kesatuan nanti dalam Perwal penjabaran anggaran," tandas Kadri.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005